



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II TAHUN 2026

Stasiun PPMHKP Padang

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2026 atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

LKj ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada stakeholder dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban organisasi dan pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Disamping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Akhirnya kami berharap agar laporan kinerja ini dapat bermanfaat serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja organisasi Stasiun PPMHKP Padang.

Padang Pariaman, 15 Juli 2026
Kepala,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dudung Daenuri, S.St.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Profil Organisasi	2
1.3. Sistematika Penyajian	4
 BAB II. PERENCANAAN KINERJA	 6
2.1. Visi dan Misi	6
2.2. Tujuan	7
2.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	8
2.4. Pengukuran Kinerja	10
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	 12
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	12
3.1.1. Capaian Kinerja Triwulan II	12
3.1.2. Perbandingan Realisasi dengan Triwulan II Tahun 2025	43
3.1.3. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahunan	45
3.1.4. Analisa Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	47
3.1.5. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Capaian Kinerja	48
3.2. Realisasi Anggaran	49
 BAB IV. P E N U T U P	 51
4.1. Kesimpulan	51
4.2. Rekomendasi	51
 LAMPIRAN	 53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Indikator Kinerja dan Target Kinerja Stasiun PPMHKP Padang Triwulan II Tahun 2026	9
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Stasiun PPMHKP Padang Triwulan II Tahun 2026 .	13
Tabel 3.2.	Data Rekapitulasi Tingkat Efektifitas Sertifikasi Primer lingkup BPPMHKP Triwulan II Tahun 2026	17
Tabel 3.3.	Nilai Pengendalian dan Pengawasan dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen Triwulan II Tahun 2026	23
Tabel 3.4.	Nilai Jaminan Mutu Hasil Perikanan Lingkup Stasiun PPMHKP Padang Semester I Tahun 2026	26
Tabel 3.5.	Persentase rencana umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPPMHKP Triwulan II Tahun 2026	40
Tabel 3.6.	Nilai SKM Stasiun PPMHKP Padang Triwulan II Tahun 2026 pada e-survey SKM BPPMHKP	43
Tabel 3.7.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025	44
Tabel 3.8.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan	46
Tabel 3.9.	Realisasi Anggaran Stasiun PPMHKP Padang Tahun pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Stasiun PPMHKP Padang	4
Gambar 2.1.	Peta Sasaran Strategis Stasiun PPMHKP Padang Tahun 2026	8
Gambar 3.1.	Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada Aplikasi Kinerjaku KKP Triwulan II Tahun 2026	12
Gambar 3.2.	Foto dokumentasi kegiatan sertifikasi Sertifikasi Pasca Panen .	22
Gambar 3.3.	Foto dokumentasi kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan Semester I di Pasar Tradisional Lubuk Buaya, Kota Padang	27
Gambar 3.4.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Stasiun PPMHKP Padang Triwulan II Tahun 2026 pada Aplikasi SIDAK	36
Gambar 3.5.	Nilai IKPA Stasiun PPMHKP Padang Semester I Tahun 2026 pada Aplikasi OmSpan, Kemenkeu	37

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang selama Triwulan II Tahun 2026. Capaian kinerja (performance results) Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang hingga akhir Triwulan II dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) pada awal Tahun 2026 sebagai tolok ukur keberhasilan atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja. Secara umum, Stasiun PPMHKP Padang telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan selama Triwulan II Tahun 2026.

Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang telah menetapkan target kinerja Triwulan II Tahun 2026 dalam bentuk Kontrak Kinerja antara Kepala Stasiun PPMHKP Padang dengan Kepala BPPMHKP yang sejalan dengan Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Target Kinerja Stasiun PPMHKP Padang yang terdiri dari 3 Sasaran Kegiatan (SK) dan 12 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Secara umum, Stasiun PPMHKP Padang telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan selama Triwulan II Tahun 2026. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dan indikator kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja kegiatan Stasiun PPMHKP Padang pada Triwulan II Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan 1 yaitu Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan :
 - a. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Padang, target 72%, realisasi 67,00%, capaian 93,06%;

- b. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Padang, target 72%, realisasi 79,66%, capaian 110,7%;
 - c. Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI lingkup Stasiun PPMHKP Padang, target 71%, realisasi 79,33%, capaian 111,7%;
 2. Sasaran Kegiatan 2 yaitu Terselenggaranya pengendalian sistem dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar :
 - a. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Padang, tidak ada target sehingga tidak dilakukan pengukuran (N/A);
 3. Sasaran kegiatan 3 yaitu Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel lingkup Stasiun PPMHKP Padang :
 - a. Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PPMHKP Padang, target 75%, realisasi 79,88%, capaian 106,5%;
 - b. Nilai pembangunan zona integritas lingkup Stasiun PPMHKP Padang tidak ada target sehingga tidak dilakukan pengukuran (N/A);
 - c. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Stasiun PPMHKP Padang tidak ada target sehingga tidak dilakukan pengukuran (N/A);
 - d. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun PPMHKP Padang target 86, realisasi 100, capaian 116,3%;
 - e. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Padang, target 83%, realisasi 97,31%, capaian 117,2%;
 - f. Nilai kinerja perencanaan anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Padang tidak ada target sehingga tidak dilakukan pengukuran (N/A);
 - g. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun PPMHKP Padang target 77, realisasi 100, capaian 120%;

- h. Survey kepuasan masyarakat lingkup Stasiun PPMHKP Padang target nilai 89, realisasi 96,53, capaian 108,5%.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang Triwulan II Tahun 2026 dengan 3 Sasaran Kegiatan dan 11 Indikator Kinerja Kegiatan realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan dan 1 Indikator Kinerja Kegiatan realisasinya dibawah target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian tersebut diupayakan untuk semakin ditingkatkan, sedangkan untuk beberapa kegiatan yang belum terlaksana/terdapat permasalahan akan diupayakan untuk dapat diselesaikan.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas Stasiun PPMHKP Padang dan menjadi umpan balik peningkatan kinerja Stasiun PPMHKP Padang pada periode berikutnya. Keberhasilan pelaksanaan dalam mendukung pengembangan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai di lingkungan Stasiun PPMHKP Padang dengan semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan melalui peningkatan pemenuhan sistem jaminan mutu dan kewananan hasil kelautan dan perikanan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang selanjutnya disingkat Stasiun PPMHKP Padang dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kinerja Tahun 2026 disusun sebagai pedoman target kinerja Stasiun PPMHKP Padang dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2026 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Stasiun PPMHKP Padang serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Stasiun PPMHKP Padang.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah..

1.2. Profil Organisasi

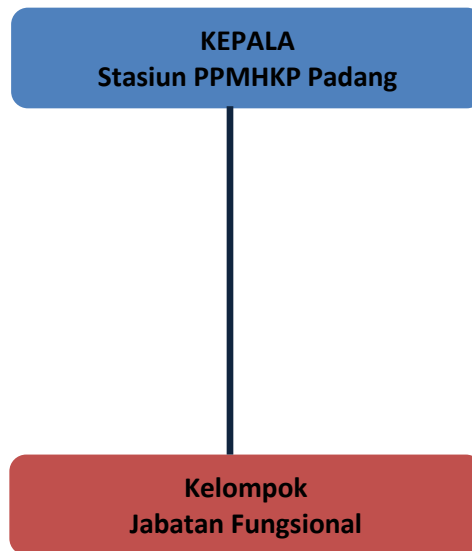
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 28/PERMEN-KP/2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang yang selanjutnya disebut Stasiun PPMHKP Padang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas yang sangat strategis, yaitu melaksanakan kegiatan layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan di Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Barat.

Didalam melaksanakan layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan di Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Barat tersebut, Stasiun PPMHKP Padang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, dan verifikasi penerbitan sertifikat pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan;

3. Pelaksanaan surveilen, pengambilan dan pengujian contoh, dan pemeriksaan tindak lanjut hasil surveilen, pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan;
5. Pelaksanaan pemantauan kesegaran ikan, residu bahan berbahaya terhadap hasil kelautan dan perikanan, serta racun hayati di perairan;
6. Pelaksanaan pengelolaan dan penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional, sistem manajemen mutu laboratorium, sistem manajemen mutu lembaga inspeksi;
7. Pelaksanaan kerja sama terkait layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
8. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
9. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
10. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam menjalankan tugasnya, pada awal tahun Tahun 2026 Stasiun PPMHKP Padang mempunyai pegawai atau sumber daya manusia sebanyak 13 (Tiga belas) orang pegawai pegawai negeri sipil baik teknis maupun administrasi yang cukup kompeten dan memadai., serta ditunjang oleh sebanyak 6 orang pegawai PPPK dan 2 orang pegawai Paruh Waktu . Bagan struktur organisasi Stasiun PPMHKP Padang dapat dilihat dalam Gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Stasiun PPMHKP Padang

1.3. Sistematika dan Penyajian

Sistematika dan isi laporan kinerja Stasiun PPMHKP Padang Triwulan II Tahun 2026 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi, sebagai berikut:

- a. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini menjelaskan gambaran secara ringkas tentang capaian kinerja selama Tahun 2026.
- b. **Bab I – Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.
- c. **Bab II – Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun yang bersangkutan.
- d. **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

- e. **Bab IV – Penutup**, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- f. **Lampiran**, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2026 dan hal- hal lainnya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan misi, yang selaras dengan visi nasional yakni “***Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045***”. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) 2025-2029 mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2026. RPJMN ini menjadi langkah penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang berfungsi sebagai fase awal dalam mencapai tujuan pembangunan kelautan dan perikanan jangka panjang.

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Kementerian Kelautan dan Perikanan dirancang untuk berfokus pada implementasi konsep *Blue Economy*, yang menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara bijaksana dan berkelanjutan, serta mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan serta meningkatkan daya saing produk kelautan di pasar global.

Sejalan dengan arah kebijakan induk KKP, Renstra ini menginternalisasi konsep Ekonomi Biru (*Blue Economy*) yang menempatkan ekologi sebagai panglima. Paradigma ini menuntut keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian ekosistem melalui lima kebijakan utama: perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, budidaya berkelanjutan, pengawasan pesisir, dan penanganan sampah laut. Di sinilah peran BPPMHKP menjadi sangat strategis, khususnya dalam aspek penjaminan mutu. BPPMHKP bertugas untuk memastikan produk kelautan dan perikanan Indonesia memiliki daya saing yang kuat baik di pasar domestik maupun internasional, karenanya diperlukan sistem jaminan mutu yang kokoh dan terintegrasi.

2.2. Tujuan

Tujuan pembangunan BPPMHKP merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Pasar internasional kini tidak hanya menuntut produk yang murah, tetapi juga produk yang aman, legal, dan berkelanjutan. Melalui Renstra ini, BPPMHKP memperkuat sistem jaminan mutu yang mengharmonisasikan standar nasional dengan regulasi negara tujuan ekspor.

Sementara untuk pasar domestik, peran BPPMHKP diarahkan pada perlindungan konsumen dan dukungan terhadap ketahanan pangan nasional. Renstra 2026-2029 menekankan pentingnya ketersediaan ikan yang tidak hanya melimpah, tetapi juga bermutu tinggi dan bebas dari kontaminan berbahaya. Hal ini berkorelasi langsung dengan upaya nasional dalam perbaikan gizi masyarakat dan penurunan angka *stunting*. Dengan mengawasi mutu produk yang beredar di pasar tradisional hingga ritel modern, BPPMHKP menjamin bahwa masyarakat Indonesia mendapatkan asupan protein terbaik, yang pada gilirannya menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan produktif.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, pendekatan yang digunakan bersifat holistik, mencakup pengawasan dari hulu hingga hilir. Di sektor hulu (budidaya dan penangkapan), BPPMHKP memastikan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) yang memadai. Di sektor hilir (pengolahan dan distribusi), fokus diarahkan pada *higiene* industri, rantai dingin (*cold chain*), logistik yang higienis, penerapan *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP), serta sistem ketertelusuran (*traceability*) produk yang terpercaya. Dengan demikian dapat meminimalkan risiko penolakan (*rejection*) di luar negeri, dan secara langsung meningkatkan citra serta daya saing Indonesia di rantai pasok global.

2.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada Tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategis, sasaran dan indikator kinerja Stasiun PPMNKP Padang Tahun 2026 ditunjukkan pada Gambar 2.1. di bawah ini :



Gambar 2.1. Peta Sasaran Strategis Stasiun PPMHKP Padang Tahun 2026

Peta strategis Stasiun PPMHKP Padang tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam indikator dan target kinerja yang akan dicapai selama Tahun Anggaran 2026 baik dalam satu tahun sekaligus maupun setiap bulannya. Metode penjabaran peta

strategis ke dalam indikator kinerja menggunakan metode cascading, dari eselon IV ke Ketua Tim Kerja hingga seluruh pegawai Seluruh PPMHKP Padang. Dengan proses cascading tersebut maka strategi organisasi didukung oleh seluruh unit dan pegawai Stasiun PPMHKP Padang dalam setiap level. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan adalah suatu bentuk keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah direncanakan. Target kinerja Stasiun PPMHKP Padang Tahun 2026 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya, telah dirinci ke dalam masing-masing perspektif sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1. Indikator Kinerja dan Target Kinerja Stasiun PPMHKP Padang Triwulan II Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Target 2026
SK 1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	72
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	72
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	71
SK 2	Terselenggaranya pengendalian sistem dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Padang (Persen)	72

SK 3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dilingkungan Stasiun PPMHKP Padang	5.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Indeks)	82,5
		6.	Nilai pembangunan zona integritas lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	77
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	86,2
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	86
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	92,1
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPK) lingkup UPT Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	71,75
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	77
		12.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	89

2.4. Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi Indikator Kinerja (IK) yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IK, akan diperoleh indeks capaian IK. Penghitungan indeks capaian IK perlu memperhitungkan jenis polarisasi IK yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IK adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
 - a) *Polarisasi Maximize*

Pada polarisasi maximize kriteria nilai terbaik pencapaian IK adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IK} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

b) *Polarisasi Minimize*

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IK adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IK} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi/Target}))\} \times 100\%$$

c) *Polarisasi Stabilize*

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IK adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IK adalah sebagai berikut

SANGAT KURANG	KURANG	CUKUP	BAIK	ISTIMEWA
≤ 50	50 – <70	70 – <90	90 – < 110	110 – 120

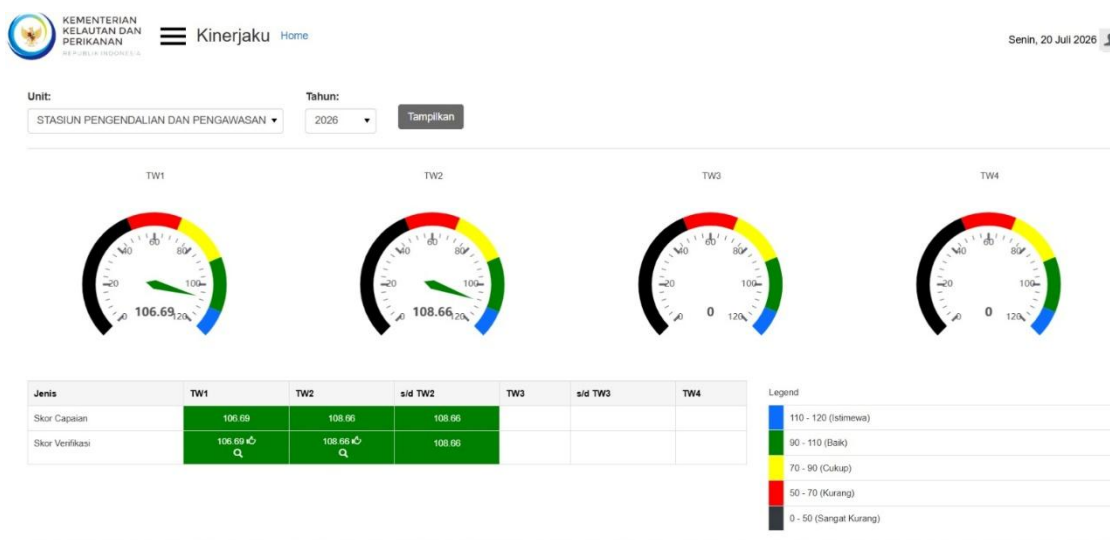
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Capaian Kinerja Triwulan II

Secara umum, target-target kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 telah tercapai. Berdasarkan dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun PPMHKP Padang sebesar 108,66% (kategori sangat baik).



Gambar 3.1. Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada Aplikasi Kinerjaku KKP Triwulan II Tahun 2026

Nilai pencapaian sasaran strategis tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja pada setiap sasaran strategis berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sekaligus keberhasilan dalam melaksanakan target kinerja program pengendalian dan

pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan BPPMHKP dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun PPMHKP Padang Triwulan II Tahun 2026 untuk setiap sasaran strategis dalam dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja KKP.

NPSS tersebut merupakan kompilasi nilai dari hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja untuk setiap sasaran strategis organisasi. Pengukuran pencapaian indikator kinerja dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya. Ringkasan capaian indikator kinerja Stasiun PPMHKP Padang Triwulan II Tahun 2026 disajikan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Stasiun PPMHKP Padang Triwulan II Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Target 2026	Target TW-2	Realiasi TW-2	Capaian %
SK 1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	72	72	67,00	93,06
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	72	72	79,66	110,7
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	71	71	79,33	111,7
SK 2	Terselenggaranya pengendalian sistem dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	72	--	--	N/A

SK 3	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel lingkup Stasiun PPMHKP Padang	5.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Indeks)	82,5	75	79,88	106,5
		6.	Nilai pembangunan integritas lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	77	--	--	--
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	86,2	--	--	--
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	86	86	100	116,3
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	92,1	83	97,31	117,2
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup UPT Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	71,75	--	--	--
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	77	77	100	120
		12.	Indek Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Indek)	89	89	96,53	108,5

Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan oleh Stasiun PPMHKP Padang. Nilai sasaran strategis ini pada Triwulan II Tahun 2026 adalah Sangat Baik. Nilai ini diperoleh berdasarkan pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja yakni :

- 1) Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%);
- 2) Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%);
- 3) Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai).

IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Padang

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI),
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Adapun cara pengukuran capaian kinerja adalah :

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

- %X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
- A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB
- B = Persentase Unit menerapkan CPIB
- C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB
- D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB
- E = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB
- F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal
- xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*)

Target Indikator Kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Padang Pada Triwulan II tahun 2026 adalah 72%, dari 6 kegiatan sertifikasi di sektor Produksi Primer yang meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan CPIB di Kapal. Realisasi capaian pada Triwulan II tahun 2026 yang dilakukan oleh Pusat Mutu Produksi Primer untuk Stasiun PPMHKP Padang realisasinya 67,0% sehingga capaian IKU ini adalah 93,06%.

Indikator Kinerja	Target 2026	Target TW-2	Realisasi TW-2	Capaian %
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Padang	72	72	67	93,06

Tabel 3.2. Data Rekapitulasi Tingkat Efektifitas Sertifikasi Primer lingkup BPPMHKP Triwulan II Tahun 2026

Lampiran : 1 (Satu) Berkas
 Nomor : B. 607/BPPMHKP.3/RC.610/VII/2026
 Tanggal : 13 Juli 2026

A. Data Rekapitulasi Tingkat Efektifitas Sertifikasi Primer UPT lingkup BPPMHKP TW II 2026

No	Satuan Kerja	Target (%)	TE CBIB	TE CPIB	TE CDOIB-CPOIB	TE CPPIB	TE CPIB Kapal	Realisasi IKU UPT	% Capaian IKU UPT
1	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	72,00	90,00	90,00	86,67	70,00	90,00	85,33	118,52%
2	Balai PPMHKP Medan I	72,00	75,00	70,00	80,00	93,33	70,00	77,67	107,87%
3	Balai PPMHKP Tanjung Pinang	72,00	95,83	70,00	70,00	70,00	85,00	78,17	108,56%
4	Balai PPMHKP Lampung	72,00	71,00	71,00	70,00	70,00	70,00	70,40	97,78%
5	Balai PPMHKP Jakarta	72,00	90,00	90,00	90,00	70,00	90,00	86,00	119,44%
6	Balai PPMHKP Semarang	72,00	90,00	88,33	70,00	70,00	70,00	77,67	107,87%
7	Balai PPMHKP Surabaya II	72,00	90,00	90,00	90,00	70,00	70,00	82,00	113,89%
8	Balai PPMHKP Entikong	72,00	85,00	65,00	65,00	65,00	65,00	69,00	95,83%
9	Balai PPMHHKP Balikpapan	72,00	70,00	71,00	70,00	70,00	90,00	74,20	103,06%
10	Balai PPMHKP Banjarbaru	72,00	71,00	71,00	70,00	70,00	70,00	70,40	97,78%
11	Balai PPMHKP Tarakan	72,00	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00	76,00	105,56%
12	Balai PPMHKP Denpasar	72,00	90,00	90,00	70,00	70,00	90,00	82,00	113,89%
13	Balai PPMHKP Mataram	72,00	89,44	71,00	70,00	70,00	70,00	74,09	102,90%
14	Balai PPMHKP Manado	72,00	70,00	71,00	70,00	73,33	88,33	74,53	103,52%
15	Balai PPMHKP Makassar	72,00	100,00	70,00	70,00	70,00	90,00	80,00	111,11%
16	Balai PPMHKP Ambon	72,00	70,00	71,00	70,00	70,00	88,33	73,87	102,59%
17	Balai PPMHKP Jayapura	72,00	85,00	85,00	65,00	65,00	83,00	76,60	106,39%
18	Stasiun PPMHKP Banda Aceh	72,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	97,22%
19	Stasiun PPMHKP Medan II	72,00	90,00	70,00	70,00	73,33	90,00	78,67	109,26%
20	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	72,00	90,00	70,00	70,00	70,00	70,00	74,00	102,78%
21	Stasiun PPMHKP Padang	72,00	70,00	70,00	65,00	65,00	65,00	67,00	93,06%
22	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	72,00	75,83	66,00	65,00	65,00	65,00	67,37	93,56%

No	Satuan Kerja	Target (%)	TE CBIB	TE CPIB	TE CDOIB-CPOIB	TE CPPI B	TE CPIB Kapal	Realisasi IKU UPT	% Capaian IKU UPT
23	Stasiun PPMHKP Jambi	72,00	88,33	80,00	70,00	80,00	70,00	77,67	107,87%
24	Stasiun PPMHKP Palembang	72,00	88,33	70,00	70,00	70,00	66,67	73,00	101,39%
25	Stasiun PPMHKP Bengkulu	72,00	90,00	70,00	65,00	65,00	65,00	71,00	98,61%
26	Stasiun PPMHKP Pangkalpinang	72,00	90,00	70,00	70,00	70,00	70,00	74,00	102,78%
27	Stasiun PPMHKP Batam	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
28	Stasiun PPMHKP Merak	72,00	89,17	90,00	70,00	90,00	70,00	81,83	113,66%
29	Stasiun PPMHKP Bandung	72,00	83,89	66,00	65,00	65,00	65,00	68,98	95,80%
30	Stasiun PPMHKP Cirebon	72,00	90,00	70,00	70,00	70,00	65,00	73,00	101,39%
31	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	72,00	100,00	70,00	70,00	70,00	87,50	79,50	110,42%
32	Stasiun PPMHKP Pontianak	72,00	72,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,40	97,78%
33	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
34	Stasiun PPMHKP Kupang	72,00	90,00	71,00	70,00	70,00	70,00	74,20	103,06%
35	Stasiun PPMHKP Bima	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
36	Stasiun PPMHKP Mamuju	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
37	Stasiun PPMHKP Palu	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
38	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	72,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	97,22%
39	Stasiun PPMHKP Kendari	72,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	97,22%
40	Stasiun PPMHKP Baubau	72,00	77,00	70,00	70,00	70,00	90,00	75,40	104,72%
41	Stasiun PPMHKP Gorontalo	72,00	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	66,40	92,22%
42	Stasiun PPMHKP Tahuna	72,00	85,00	65,00	65,00	65,00	83,33	72,67	100,93%
43	Stasiun PPMHKP Ternate	72,00	83,33	65,00	65,00	65,00	85,00	72,67	100,93%
44	Stasiun PPMHKP Sorong	72,00	65,00	65,00	70,00	70,00	70,00	68,00	94,44%
45	Stasiun PPMHKP Merauke	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
	Jumlah		3622,17	3237,33	3141,67	3135,00	3332,17	3293,67	
	%Realisasi IKU Primer		80,49	71,94	69,81	69,67	74,05	73,19	
	% Capaian IKU Primer		113,37	102,77	93,09	92,89	102,84	101,66	

IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup lingkup Stasiun PPMHKP Padang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi pasca panen memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota.

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/*Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memenuhi syarat dan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada kegiatan penanganan dan/atau pengolahan di UPI. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah oleh UPI.

Permohonan penerbitan sertifikat HACCP dapat berupa :

1. Permohonan baru, merupakan pengajuan sertifikasi HACCP bagi UPI/pelaku usaha baru yang belum memiliki sertifikat HACCP.
2. Permohonan perpanjangan, merupakan pengajuan sertifikasi HACCP untuk perpanjangan sertifikat yang sudah habis masa berlakunya.
3. Permohonan penambahan ruang lingkup, merupakan pengajuan sertifikasi HACCP bagi UPI yang akan menambah ruang lingkup produk
4. Permohonan peninjauan ulang, merupakan pengajuan sertifikasi HACCP bagi UPI yang mengalami penurunan peringkat sertifikat HACCP

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang telah menerapkan cara penanganan dan/atau pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi.

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanganan dan/atau pengolahan ikan di Unit Pengolahan Ikan (UPI). UPI yang dimaksud antara lain :

1. Unit penanganan dan pengolahan ikan;
2. Unit penanganan ikan hidup;

3. Unit penanganan rumput laut kering;
4. Gudang beku;
5. Gudang dingin;
6. Gudang kering, dan/atau
7. Miniplant

Pelaku usaha baik perorangan ataupun non perorangan yang mengajukan sertifikasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*)/Sistem OSS dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

1. Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara untuk penanggung jawab mutu diterbitkan paling lama 5 tahun sebelum pengajuan permohonan SKP (dikecualikan bagi UPI skala mikro kecil).
2. Panduan Mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Pemenuhan Persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi untuk setiap jenis ikan dan/atau jenis produk yang diolah (Bentuk & format sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun 2019)
3. Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Pembina Mutu di daerah

Adapun cara pengukuran capaian kinerja adalah :

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)*)

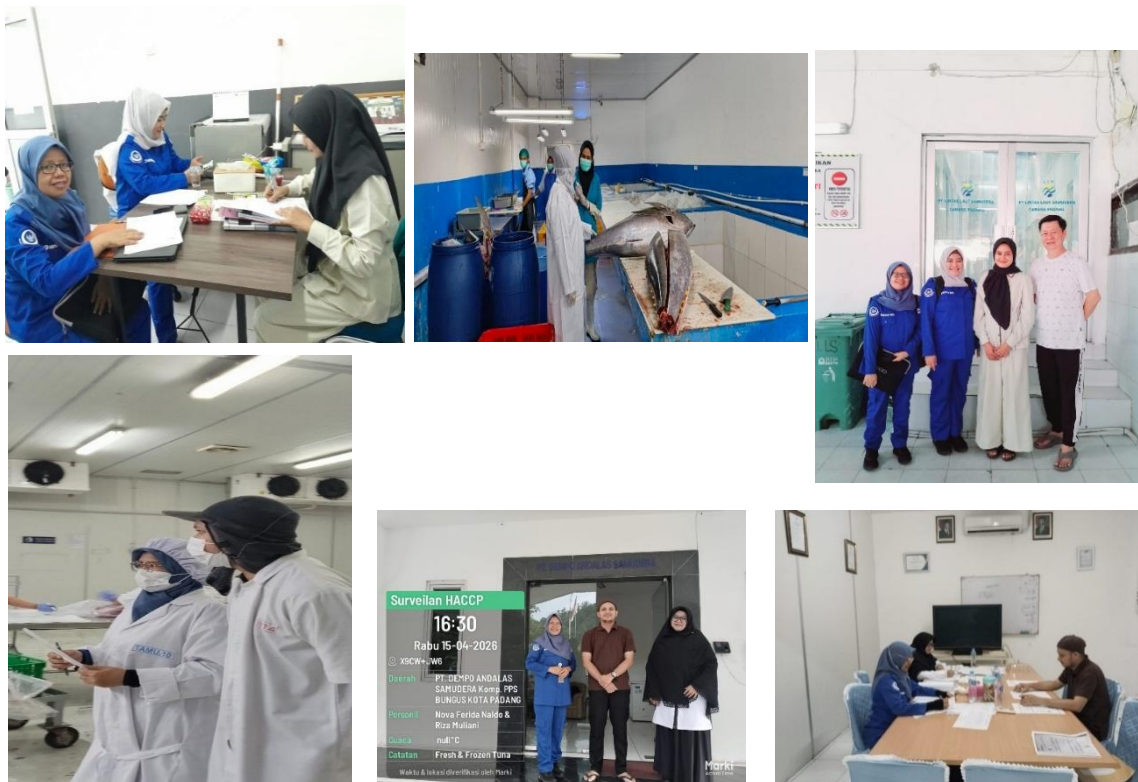
Pada Triwulan II tahun 2026 dari target kinerja yang ditetapkan 72% realisasinya 79,66%, sehingga capainnya 110,7%. Hal ini berdasarkan penilaian

Pusat Mutu Pasca Panen dimana realisasi penerbitan sertifikat HACCP 88,10%, realisasi persentase SKP yang diterbitkan 88,38% dan SPDI realisasinya 62,5%, dengan perhitungan :

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

$$\%X = \frac{88,10\% + 88,38\% + 62,50\%}{3} = 79,66\%$$

Indikator Kinerja	Target 2026	Target TW-2	Realisasi TW-2	Capaian %
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	72	72	79,66	110,7%



Gambar 3.2. Foto dokumentasi kegiatan sertifikasi Sertifikasi Pasca Panen

Tabel 3.3. Nilai Pengendalian dan Pengawasan dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen Triwulan II Tahun 2026

**PERUBAHAN NILAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKTOR
PASCAPANEN TRIWULAN II TAHUN 2026**

No	UPT	Target	TE SKP	TE HACCP	TE SPDI	Nilai Capaian IKU UPT
1	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	72%	86,95	93,62	87,50	89,36
2	Balai PPMHKP Ambon	72%	85,93	94,26	75,00	85,06
3	Balai PPMHKP Balikpapan	72%	88,22	90,83	75,00	84,68
4	Balai PPMHKP Banjarbaru	72%	95,74	97,50	86,70	93,31
5	Balai PPMHKP Denpasar	72%	91,42	86,42	75,00	84,28
6	Balai PPMHKP Entikong	72%	94,44	75,00	75,00	81,48
7	Balai PPMHKP Jakarta	72%	92,39	94,36	87,80	91,52
8	Balai PPMHKP Jayapura	72%	96,39	77,78	62,50	78,89
9	Balai PPMHKP Lampung	72%	83,34	91,67	75,00	83,34
10	Balai PPMHKP Makassar	72%	96,44	95,78	87,50	93,24
11	Balai PPMHKP Manado	72%	89,29	91,24	62,50	81,01
12	Balai PPMHKP Mataram	72%	98,34	98,34	75,00	90,56
13	Balai PPMHKP Medan I	72%	92,28	93,24	62,50	82,67
14	Balai PPMHKP Semarang	72%	90,25	93,34	87,50	90,36
15	Balai PPMHKP Surabaya II	72%	86,61	88,22	87,50	87,44
16	Balai PPMHKP Tanjungpinang	72%	97,22	95,00	75,00	89,07
17	Balai PPMHKP Tarakan	72%	89,22	70,00	75,00	78,07
18	Stasiun PPMHKP Aceh	72%	97,00	77,78	87,50	87,43
19	Stasiun PPMHKP Bandung	72%	88,15	90,93	87,50	88,86
20	Stasiun PPMHKP Batam	72%	77,78	98,34	62,50	79,54
21	Stasiun PPMHKP Bau-Bau	72%	75,54	54,43	75,00	68,32
22	Stasiun PPMHKP Bengkulu	72%	88,89	93,89	87,50	90,09
23	Stasiun PPMHKP Bima	72%	68,33	68,33	75,00	70,55
24	Stasiun PPMHKP Cirebon	72%	92,22	98,34	87,50	92,69
25	Stasiun PPMHKP Gorontalo	72%	89,77	70,33	75,00	78,37
26	Stasiun PPMHKP Jambi	72%	95,56	77,78	75,00	82,78
27	Stasiun PPMHKP Kendari	72%	74,08	65,18	75,00	71,42
28	Stasiun PPMHKP Kupang	72%	89,54	93,96	62,50	82,00
29	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	72%	86,86	66,68	75,00	76,18
30	Stasiun PPMHKP Mamuju	72%	77,78	77,78	87,50	81,02
31	Stasiun PPMHKP Medan II	72%	97,00	94,31	75,00	88,77
32	Stasiun PPMHKP Merak	72%	82,22	90,00	75,00	82,41
33	Stasiun PPMHKP Merauke	72%	54,43	54,43	62,50	57,12
34	Stasiun PPMHKP Padang	72%	88,38	88,10	62,50	79,66
35	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	72%	77,78	77,78	75,00	76,85
36	Stasiun PPMHKP Palembang	72%	86,12	87,24	82,50	85,29
37	Stasiun PPMHKP Palu	72%	76,67	65,56	62,50	68,24
38	Stasiun PPMHKP Pangkalpinang	72%	97,22	96,67	62,50	85,46
39	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	72%	96,11	77,78	62,50	78,80
40	Stasiun PPMHKP Pontianak	72%	95,93	77,78	75,00	82,90
41	Stasiun PPMHKP Sorong	72%	86,11	91,11	75,00	84,07
42	Stasiun PPMHKP Tahuna	72%	54,43	54,43	75,00	61,29
43	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	72%	93,67	93,33	75,00	87,33
44	Stasiun PPMHKP Ternate	72%	96,11	98,34	87,50	93,98
45	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	72%	98,33	97,50	95,00	96,94

Kepala Pusat Mutu Pascapanen



Ditandatangani
Secara Elektronik

Catur Sarwanto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IK3. Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Lokasi)

Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai Pengawasan Mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran *marine biotoxin* dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP.

Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini dilakukan di Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan Lokasi wilayah Perairan/Pelabuhan Perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestik yang bebas dari cemaran *marine biotoxin* dan cemaran kimia berbahaya.

Adapun cara pengukurannya adalah :

$$\%X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

%X = Persentase pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI
 A = Jumlah kab/kota /yang dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI
 B = Jumlah kab/kota/yang ditetapkan untuk dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI

Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik pada Stasiun PPMHKP Padang tahun 2026 dilakukan dua kali dalam setahun yaitu pada semester I dan semester II di Kota Padang dengan lokus Pasar Lubuk Buaya, Pasar Modern Mall Suzuya Stasiun Padang.

Sebelum pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan dilaksanakan, dilakukan Pembentukan Tim Daerah Pelaksana Kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Tim Inpres 01/2017) Tahun 2026 dengan melibatkan :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar
2. Balai Besar POM Padang
3. Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang
4. Dinas Kesehatan Kota Padang
5. Satuan Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Padang
6. Perguruan Tinggi (Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Bung Hatta)
7. UPTD Pasar Lubuk Buaya
8. Koordinator Penyuluh Perikanan Kota Padang.

Realisasi dari kegiatan ini adalah dengan dilakukannya pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik di Kota Padang pada semester I tahun 2026 dengan lokasi Psar Lubuk buaya dan Pasar Modern Suzuya.

Setelah dilakukan survey, didapatkan

- 1 Nilai sarana prasarana = 75,00
2. Nilai pengujian produk = 85,83

$$\text{Nilai Jaminan Mutu} = (60\% \times 75,00) + (40\% \times 85,83) = \mathbf{79,33\%}$$

Indikator Kinerja	Target 2026	Target TW-2	Realisasi TW-2	Capaian %
Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	71	71	79,33	111,7

Secara sederhana dapat dinyatakan nilai angka jaminan mutu keamanan produk perikanan di Kota Padang pada Semester I Tahun 2026 adalah **79,33 %** yang memenuhi persyaratan, sedangkan 20,67 % dengan angka jaminan mutu belum

memenuhi persyaratan. Nilai angka jaminan mutu ini termasuk kriteria baik, sesuai dengan table berikut:

Tabel 3.4. Nilai Jaminan Mutu Hasil Perikanan Lingkup Stasiun PPMHKP Padang Semester I Tahun 2026

No	TW	Kabupaten/Kota	Nilai Angka Jaminan Mutu		
			Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Kriteria
1	TW I	Kabupaten Maros	91,30%	8,70%	Sangat Baik
2		Kota Semarang	91,50%	8,50%	Sangat Baik
3		Kota Bandar Lampung	83,05%	16,95%	Baik
4		Kota Cirebon	80,01%	19,99%	Baik
5		Kabupaten Bantul	63,98%	36,02%	Cukup
TOTAL			81,97%	18,03	Baik
6	TW II	Kabupaten Sidoarjo	79,30%	20,70%	Baik
7		Kabupaten Badung	83,91%	16,09%	Baik
8		Kota Padang	79,33%	20,67%	Baik
9		Kota Palembang	66,19%	33,81%	Cukup
10		Kabupaten Kuburaya	67,39%	32,61%	Cukup
11		Kota Kupang	32,06%	67,94%	Kurang
12		Kabupaten Merauke	75,50%	24,50%	Baik
13		Kota Bandung	74,36%	25,64%	Baik
14		Kota Cimahi	70,14%	29,86%	Baik
15		Kota Tarakan	64,39%	35,61%	Cukup
16		Kota Banda Aceh	75,27%	24,73%	Baik
17		Kota Banjarmasin	72,80%	27,20%	Baik
18		Kota Bengkulu	82,68%	17,32%	Baik
19		Kota Jambi	71,78%	28,22%	Baik
20		Kota Jakarta Selatan	82,60%	17,40%	Baik
21		Kota Jakarta Utara	82,60%	17,40%	Baik
22		Kota Medan	65,50%	34,50%	Cukup
23		Kota Cilegon	53,20%	46,80%	Kurang
24		Kota Serang	53,20%	46,80%	Kurang
TOTAL			70,12%	29,88%	Baik



Gambar 3.3. Foto dokumentasi kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan Semester I di Pasar Tradisional Lubuk Buaya, Kota Padang

Sasaran Kegiatan 2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan oleh Stasiun PPMHKP Padang. Nilai sasaran strategis ini pada Triwulan II Tahun 2026 adalah Sangat Baik. Nilai ini diperoleh berdasarkan pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yakni:

1. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai);

IK5. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)

Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Padang merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan hasil penilaian dari evaluasi terhadap Lembaga Inspeksi dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17020:2012. Hasil penilaian dinyatakan dalam bentuk nilai berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri.

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian (ISO 17025) di laboratorium *official control*. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17025 yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

Cara pengukuran rata-rata nilai tingkat pemenuhan klausul dalam ISO 17025 yang terverifikasi :

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

$\bar{X}$ = Rata rata

$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke- 1, 2, 3, .., n

n = banyaknya nilai tingkat pemenuhan

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum;
2. Persyaratan Struktural;
3. Persyaratan Sumberdaya;
4. Persyaratan Proses;
5. Persyaratan Sistem Manajemen.

Cara pengukuran :

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

$\bar{X}$ = Rata rata

$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke- 1, 2, 3, .., n

n = banyaknya nilai tingkat pemenuhan

Pada Triwulan II tahun 2026 belum ada ditargetkan sehingga sehingga capaiannya belum dilakukan perhitungan.

Indikator Kinerja	Target 2026	Target TW-2	Realisasi TW-2	Capaian %
Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	72	--	--	N/A

Sasaran Kegiatan 3. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan Stasiun PPMHKP Padang

Capaian kinerja BPPMHKP pada *Learning and Growth Perspective* berasal dari sasaran kegiatan Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Padang dengan Indikator Kinerja:

- 1) Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Indeks);
- 2) Nilai pembangunan zona integritas lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai);
- 3) Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai);
- 4) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%);

- 5) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai);
- 6) Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai);
- 7) Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%);
- 8) Survey kepuasan masyarakat lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai).

IK5. Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PPMHKP Padang

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 dimensi meliputi: kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin.

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi: pendidikan S3, S2, S1, D3, D1, SLTA sederajat dan dibawah SLTA
2. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/ Diklat Teknis, Diklat 20 Jam (JP) satu tahun terakhir, seminar/Workshop/ konferensi/setara satu tahun terakhir.

3. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi SKP dan Prilaku Kerja.
4. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin.

Untuk Satker Stasiun PPMHKP Padang ditetapkan target Tahun 2026 sebesar 87. Pengukuran dilakukan pada Semester I dan Semester II. Pada Semester I (Triwulan II) ini target yang ditetapkan adalah 75. Sementara realisasi sebagaimana yang dapat dilihat pada Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN adalah 79,88. Dengan demikian capaian kinerja IK ini adalah 106,5%.

28	STASIUN PPMHKP PADANG	19	22.63	90.52 %	27.25	68.13 %	25	83.33 %	5	100 %	79.88	SEDANG
29	STASIUN PPMHKP JAMBI	23	21.96	87.84 %	28.74	71.85 %	25	83.33 %	5	100 %	80.7	SEDANG

Indikator Kinerja	Target 2026	Target TW-2	Realisasi TW-2	% Thd Target Tahunan
Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Indek)	82,5	75	79,88	106,5

IK6. Nilai pembangunan zona integritas lingkup Stasiun PPMHKP Padang

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 75 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporannya.

Nilai minimum untuk berpredikat WBK dicapai dengan evaluasi untuk memperoleh hasil nilai WBK ≥ 75 yang terdiri dari: **Nilai Pengungkit** yang diperoleh dari aspek Pemenuhan dan Reform (manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, pelayanan publik) dan **Nilai Hasil** yang diperoleh dari komponen birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan mengacu kepada Permen KP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang PEMBANGUNAN Integritas di Lingkungan KKP.

Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen system antikorupsi, yang meliputi :

- a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
- b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
- c. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%)
- d. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%)
- e. Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%)
- f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)

Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

Pada Tahun 2026 Satker Stasiun PPMHKP Padang memiliki target sebesar 70%. Pengukuran capaian kinerja dilakukan akhir tahun sehingga capaian IK pada Triwulan II ini belum dilakukan pengukuran.

Indikator Kinerja	Target 2026	Target TW-2	Realisasi TW-2	% Thd Target Tahunan
Nilai pembangunan integritas lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	77	--	--	--

IK7. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Stasiun PPMHKP Padang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Level II dihitung berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan BPPMHKP.

Cara Pengukurannya :

1. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Level II adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I
2. Apabila penilaian tidak dilakukan oleh Inspektorat Mitra, maka nilai SAKIP Level II diperoleh melalui Penilaian Mandiri SAKIP oleh Sekretariat BPPMHKP.

Pada Tahun 2026 Satker Stasiun PPMHKP Padang memiliki target nilai SAKIP sebesar 86,2. Pengukuran capaian kinerja dilakukan akhir tahun sehingga capaian IK pada Triwulan II ini belum dilakukan pengukuran.

Indikator Kinerja	Target 2026	Target TW-2	Realisasi TW-2	% Thd Target Tahunan
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	86,2	--	--	N/A

IK8. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun PPMHKP Padang

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (Status Tindak Lanjut adalah TUNTAS) oleh Stasiun PPMHKP Padang yang menjadi objek pengawasan.

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP kepada BPPMHKP berdasarkan LHP yang dihitung setiap triwulan yang dapat dilihat pada aplikasi SIDAK. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Stasiun PPMHKP Padang merupakan persentase perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP dengan rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT.

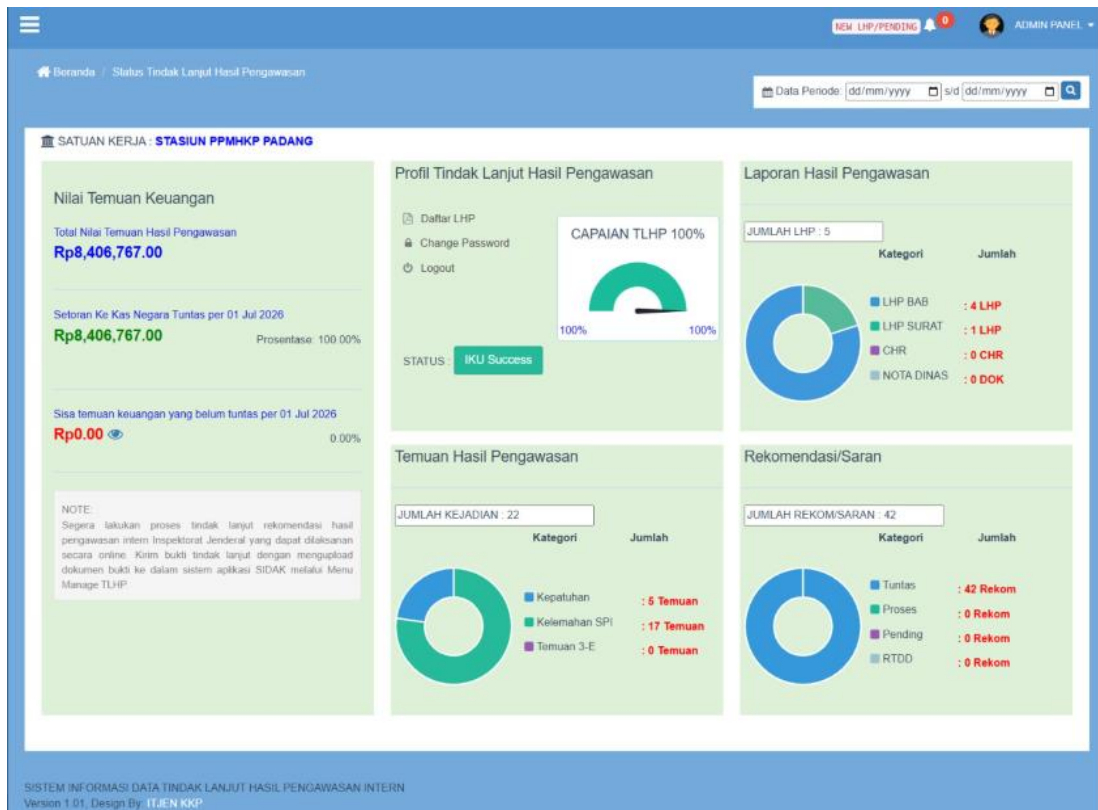
Penghitungan capaian :

$$\%X = \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti
 $\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan

Pada Triwulan II Tahun 2026 target yang ditetapkan adalah 86%. Berdasarkan data aplikasi SIDAK Stasiun PPMHKP Padang pada Triwulan II ini telah memanfaatkan seluruh rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP guna perbaikan kinerja UPT. Dengan demikian dari target 86% realisasinya 100% sehingga capaiannya 116,3%.

Indikator Kinerja	Target 2026	Target TW-2	Realisasi TW-2	% Thd Target Tahunan
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Stasiun PPMHKP Padang (%)	86	86	100	116,3



Gambar 3.4. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Stasiun PPMHKP Padang Triwulan II Tahun 2026 pada Aplikasi SIDAK

IK9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Padang

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Pengukuran capaian kinerja untuk IK Indikator IKPA UPT Stasiun PPMHKP Padang mengadopsi hasil penilaian yang ada pada **Aplikasi OmSpan** Direktorat

Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), yaitu :

- Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Target IK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) UPT Stasiun PPMHKP Padang Tahun 2026 ditetapkan 92,1. Pengukuran capaian kinerja dilakukan pada Semester I dan II. Pada Semester I (Triwulan II) ini nilai target yang ditetapkan adalah 83, sementara realisasinya berdasarkan data yang ada pada **Aplikasi OmSpan** Direktorat Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan adalah 97,31. Dengan demikian capaian IK ini pada Semester I sebesar 117,2%

Indikator Kinerja	Target 2026	Target TW-2	Realisasi TW-2	% Thd Target Tahunan
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	92,1	83	97,31	117,2



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPB

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output					Nilai Aspek
1	06 Juni	010	032	567432	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	91,98 15 13,80	95,99	96,66 20 19,33	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	98,13 10 9,81	97,40	99,61 25 24,90	99,61	77,84	80,00%	0,00	97,31

Gambar 3.5. Nilai IKPA Stasiun PPMHKP Padang Semester I Tahun 2026 pada Aplikasi Om-Span, Kemenkeu

IK10. Nilai kinerja perencanaan anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Padang

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target akhir tahun anggaran 2026 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
2. Baik, apabila NKA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
5. Sangat kurang, apabila NKA ≤ 50

Cara mengukur capaian Indikator Kinerja pada IK ini adalah dengan mengambil data dari Aplikasi MONEV KEMENKEU pada Smart DJA. Target indikator kinerja Nilai kinerja pelaksanaan anggaran UPT Stasiun PPMHKP Padang pada Tahun 2026 adalah 71,75 dimana pengukuran capaian dilakukan akhir tahun. Dengan demikian pada Triwulan II ini belum dilakukan pengukuran.

Indikator Kinerja	Target 2026	Target TW-2	Realisasi TW-2	% Thd Target Tahunan
Nilai kinerja perencanaan anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	71,75	--	--	N/A

IK11. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun PPMHKP Padang

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Untuk menghitung persentase capaian rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun PPMHKP Padang menggunakan rumus sebagai berikut

$$= \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan di SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang dan Jasa}} \times 100$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini. Kegiatan yang telah dilaksanakan :

1. Sebelum operator menginput data barang dan jasa dalam aplikasi SIRUP terlebih dahulu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemegang akun KPA dan PPK
2. Menginventarisir kegiatan dan anggaran pada RKA-KL

3. Mengupload ke dalam aplikasi SIRUP rencana umum pengadaan barang dan jasa lingkup UPT Stasiun PPMHKP Padang

Pada Triwulan II ini BPPMHKP (eselon 1) mendapatkan nilai sebesar 100 dengan target 77 % sehingga capaian menjadi 120 % hal ini dapat dilihat pada aplikasi SIRUP pada Biro Umum dan PBJ serta Nota Dinas Nomor B.736/SJ.7/TU.140/VII/2026 tertanggal 9 Juli 2026, Dimana data yang diambil berdasarkan nilai dari Eselon 1 BPPMHKP bukan data dari masing-masing UPT, hal ini dapat dilihat pada tabel sbb:

Tabel 3.5. Persentase rencana umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPPMHKP Triwulan II Tahun 2026

Lampiran 1

Nomor : B.736/SJ.7/PL.410/VII/2026
Tanggal : 9 Juli 2026

**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK
PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN TERUMUMKAN TRIWULAN 2 TAHUN ANGGARAN 2026
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

No	Kode E1	Nama Unit Eselon I	Σ Satker	Persentase RUP Terumumkan				Keterangan	Capaian IKUTW II - TA. 2026		
				Σ Pagu Pengadaan	Σ Pagu Terumumkan	Σ Selisih Terumumkan	% RUP Terumumkan		Target Score IKUTW II	Capaian Score IKUTW II	Keterangan
1	06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	90,098,492,000	90,098,492,000	0	100.00	SESUAI	77.00	100.00	Capaian Sesuai Target Maksimal
2	08	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	1	40,528,993,000	40,528,993,000	0	100.00	SESUAI	75.00	100.00	Capaian Sesuai Target Maksimal
3	07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	5	1,179,150,929,000	1,179,089,911,000	61,018,000	99.99	KURANG Terumumkan	76.00	99.99	Capaian melebihi Target
4	03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	6,538,648,319,000	6,539,057,155,000	(408,836,000)	100.01	LEBIH Terumumkan	77.00	99.99	Capaian melebihi Target
5	01	Sekretariat Jenderal	3	274,871,947,000	274,960,715,000	(88,768,000)	100.03	LEBIH Terumumkan	85.00	99.97	Capaian melebihi Target
6	12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	42	1,044,582,048,000	1,044,261,636,000	320,412,000	99.97	KURANG Terumumkan	77.00	99.97	Capaian melebihi Target
7	04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	1,971,753,400,000	1,966,947,970,304	4,805,429,696	99.76	KURANG Terumumkan	77.00	99.76	Capaian melebihi Target
8	05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	1,616,878,809,000	1,612,951,093,400	3,927,715,600	99.76	KURANG Terumumkan	77.00	99.76	Capaian melebihi Target
9	13	Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	47	180,543,219,000	181,335,346,000	(792,127,000)	100.44	LEBIH Terumumkan	77.00	99.56	Capaian melebihi Target
10	02	Inspektorat Jenderal	1	13,030,248,000	13,093,680,000	(63,432,000)	100.49	LEBIH Terumumkan	77.00	99.51	Capaian melebihi Target
TOTAL			156	12,950,086,404,000	12,942,324,991,704	7,761,412,296	99.94	LEBIH Terumumkan	SKORITKP	5.00	Persentase RUP : ≥90% - <110%



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

Lampiran 2

Nomor : B.736/SJ.7/PL.410/VI/2026

Tanggal : 9 Juli 2026

**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK
PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN TERUMUMKAN TRIWULAN 2 TAHUN ANGGARAN 2026 PER SATUAN KERJA**

(06) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan – 2 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP				STATISTIK MONER		
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
06									
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	427686	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN HASIL PERIKANAN	7,259,474,000		7,259,474,000	7,259,474,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
2	622131	SETDITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	82,839,018,000		82,839,018,000	82,839,018,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
TOTAL			90,098,492,000	-	90,098,492,000	90,098,492,000	-	100.00%	Capaian IKU : 100.00

(08) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut – 1 Satker.

07									
No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP			STATISTIK MONER			
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
1	691706	DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT	40,493,593,000	35,400,000	40,528,993,000	40,528,993,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
TOTAL			40,493,593,000	35,400,000	40,528,993,000	40,528,993,000	-	100.00%	Capaian IKU : 100.00

(07) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan – 5 Satker.

CETAKAN PAKET RUP									
No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
07									
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN									
1	499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL BKKPN KUPANG	6,000,697,000		6,000,697,000	6,000,697,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
2	477410	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	3,035,086,000		3,035,086,000	3,035,086,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
3	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	2,736,010,000		2,736,010,000	2,736,010,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
4	477456	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	2,970,613,000		2,970,613,000	2,970,613,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
5	622145	SETDITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	1,164,347,505,000		1,164,347,505,000	1,164,408,523,000	(61,018,000)	99.99%	KURANG TERUMUMKAN
TOTAL			1,179,089,911,000	-	1,179,089,911,000	1,179,150,929,000	(61,018,000)	99.99%	Capaian IKU : 99.99%

(13) Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan – 47 Satker.

No		Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP			STATISTIK MONER			
				PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	13	BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	427598	BALAI BESAR KIPM DAN KHP MAKASSAR	18,787,046,000		18,787,046,000	18,787,046,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%	
2	567610	BALAI KIPM DAN KHP BALIKPAPAN	726,519,000		726,519,000	726,519,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%	
3	649615	BALAI KIPM DAN KHP LAMPUNG	1,029,385,000		1,029,385,000	1,029,385,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%	
4	649750	BALAI KIPM DAN KHP AMBON	1,339,462,000		1,339,462,000	1,339,462,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%	
5	649593	BALAI KIPM DAN KHP BANJARMASIN	1,057,310,000		1,057,310,000	1,057,310,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%	
6	427624	BALAI KIPM DAN KHP DENPASAR	2,030,406,000		2,030,406,000	2,030,406,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%	
7	649568	BALAI KIPM DAN KHP ENTIKONG	526,628,000		526,628,000	526,628,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%	
8	649682	BALAI KIPM DAN KHP JAKARTA II	2,027,441,000		2,027,441,000	2,027,441,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%	
9	567812	BALAI KIPM DAN KHP JAYAPURA	942,893,000		942,893,000	942,893,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%	
10	567631	BALAI KIPM DAN KHP MANADO	1,141,041,000		1,141,041,000	1,141,041,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%	
11	567758	BALAI KIPM DAN KHP MATARAM	922,433,000		922,433,000	922,433,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%	
12	427567	BALAI KIPM DAN KHP MEDAN I	1,263,624,000		1,263,624,000	1,263,624,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%	
13	649661	BALAI KIPM DAN KHP SEMARANG	1,433,853,000		1,433,853,000	1,433,853,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%	
14	427542	BALAI KIPM DAN KHP SURABAYA I	2,131,730,000		2,131,730,000	2,131,730,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%	
15	649788	BALAI KIPM DAN KHP SURABAYA II	909,530,000	2,380,979,000	3,290,509,000	3,290,509,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%	
37	567432	STASIUN KIPM DAN KHP PADANG	748,892,000		748,892,000	748,892,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%	
38	649657	STASIUN KIPM DAN KHP PALANGKARAYA	853,490,000		853,490,000	853,490,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%	
39	567481	STASIUN KIPM DAN KHP PALEMBANG	390,073,000		390,073,000	390,073,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%	
40	649601	STASIUN KIPM DAN KHP PALU	397,648,000		397,648,000	397,648,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%	

Indikator Kinerja	Target 2026	Target TW-2	Realisasi TW-2	% Thd Target Tahunan
Persentase rencana umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	77	77	100	120

IK12. Indeks kepuasan masyarakat lingkup Stasiun PPMHKP Padang

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup UPT Stasiun PPMHKP Padang menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/ pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ok.bPPMHKP.kkp.go.id/skm/>. Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Pada Triwulan II Tahun 2026 nilai hasil survey IKM Stasiun PPMHKP Padang adalah 96,53 dari target 89 yang ditetapkan, hal ini berarti capaian kinerja IK ini adalah 108,5%.

Indikator Kinerja	Target 2026	Target TW-2	Realisasi TW-2	Capaian %
Indeks kepuasan masyarakat lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Indeks)	89	89	96,53	108,5

Tabel 3.6. Nilai SKM Stasiun PPMHKP Padang Triwulan II Tahun 2026 pada e-survey SKM BPPMHKP

		95,70	95,00	95,00	94,50	95,35	95,70	95,00	95,35	95,35						
31	Stasiun PPMHKP Padang	4,00	4,00	3,75	4,00	4,00	3,75	3,50	3,50	3,75	3,81	95,14	A	Sangat Baik	4	Online
		100,00	100,00	93,75	100,00	100,00	93,75	87,50	87,50	93,75						
32	Balai PPMHKP	3,82	3,81	3,78	3,78	3,81	3,78	3,77	3,81	3,80	3,80	94,93	A	Sangat Baik	74	Online

3.1.2. Perbandingan Realisasi dengan Triwulan II Tahun 2025

Secara umum seluruh target kinerja Stasiun PPMHKP Padang pada periode Triwulan II tahun anggaran 2025 dan Triwulan II tahun anggaran 2026 tercapai sesuai dengan rencana dan berhasil dengan baik. Capaian kinerja sesuai dengan semua target yang telah diteapkan untuk Triwulan II dalam Perjanjian Kinerja Stasiun PPMHKP Padang dan telah sesuai dengan kemampuan SDM serta pagu anggaran yang diberikan. Dalam hal pemanfaatan anggaran, sebagian besar telah dilaksanakan secara efisien. Capaian kinerja ini telah sesuai dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Stasiun PPMHKP Padang.

Dilihat dari dari dashboard aplikasi Kinerjaku, capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 lebih rendah dibanding capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 dimana pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 108,66, sedangkan Triwulan II Tahun 2025 sebesar 113,41. Hasil perbandingan capaian kinerja Stasiun PPMHKP Padang Triwulan II Tahun 2026 terhadap target Triwulan II Tahun 2025 dengan secara rinci dapat dilihat Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

No IKU	Indikator Kinerja	Target TW-2 Tahun 2025	Realisasi TW-2 Tahun 2025	Target TW-2 Tahun 2026	Realisasi TW-2 Tahun 2026	Naik/ Tetap/ Turun
1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Padang (%)	70	100	72	67,00	Turun
2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Padang (%)	70-	100	72	79,67	Turun
3	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	--	--	71	79,33	N/A
4	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Padang (Persen)	--	--	--	--	N/A
5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Indeks)	81	82,5	75	79,88	Turun
6	Nilai pembangunan integritas lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	--	--	--	--	N/A
7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	--	--	--	--	N/A
8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	85	100	86	100	Tetap
9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	85	96,3	83	97,31	Naik
10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	--	--	--	--	N/A
11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	76	100	77	100	Tetap
12	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Indek)	88	100	89	96,53	Turun

3.1.3. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahunan

Capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja yang telah dicapai dalam satu tahun anggaran. Target Kinerja Stasiun PPMHKP Padang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Stasiun PPMHKP Padang dan Kepala BPPMHKP. Indikator yang tercantum dalam perjanjian kinerja akan menyesuaikan dengan arahan dan kebijakan pimpinan dalam hal ini Kepala BPPMHKP. Analisis terhadap akuntabilitas kinerja Stasiun PPMHKP Padang dilakukan sebagai upaya untuk memberikan penjelasan keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, serta visi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Analisis Akuntabilitas Kinerja merupakan analisis efisiensi dan efektifitas dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu dan juga menjelaskan mengenai manfaat lain yang dapat ditimbulkan oleh suatu kegiatan. Secara umum, dalam hal melakukan perbandingan capaian kinerja Triwulan II dengan Perjanjian Kinerja Stasiun PPMHKP Padang.

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PPMHKP Padang Triwulan II Tahun 2026 menyajikan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Tahun 2026. Pada Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PPMHKP Padang, ada beberapa IK yang pengukuran dilakukan secara semesteran maupun tahunan. Pada Triwulan II ini sebagai triwulan terakhir pengukuran capaian I seluruhnya telah terealisasi dalam rangka mendukung capaian kinerja organisasi. Untuk menilai keberhasilan capaian IK tersebut, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Indikator-Indikator tersebut.

Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II dengan Target Tahunan

No IKU	Indikator Kinerja	Target 2026	Target TW-2	Realisasi TW-2	% Thd Target Tahunan
1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	72	72	69,2	96,12
2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	72	72	79,66	110,7
3	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	71	71	79,33	111,7
4	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Persen)	72	--	--	N/A
5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Indeks)	82,5	75	79,88	106,5
6	Nilai pembangunan zona integritas lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	77	--	--	N/A
7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	86,2	--	--	N/A
8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	86	86	100	116,3
9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	92,1	83	97,31	117,2
10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	71,75	--	--	N/A
11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	77	77	100	120
12	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Indek)	89	89	96,33	108,5

3.1.4. Analisa Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Secara umum, target-target kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 telah tercapai. Berdasarkan dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun PPMHKP Padang sebesar 108,66% (kategori sangat baik). Nilai pencapaian sasaran strategis tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja pada setiap sasaran strategis berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi Stasiun PPMHKP Padang Triwulan II Tahun 2026.

Faktor penyebab keberhasilan capaian kinerja untuk IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun PPMHKP Padang dan IK Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun PPMHKP Padang dimana capainnya diatas 100% adalah sebagai bentuk kepatuhan Stasiun PPMHKP Padang terhadap ketentuan peraturan dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan operasional. Keberhasilan ini juga karena adanya komitmen Stasiun PPMHKP Padang dalam upaya melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerja sebagaimana yang direkmendasikan oleh pengawas baik pengawas internal maupun pengawas eksternal.

Faktor penyebab keberhasilan IK Survey kepuasan masyarakat lingkup UPT Stasiun PPMHKP Padang mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, tindak terlepas dari baiknya pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa oleh personil SPPMHKP Padang selama ini. Stasiun PPMHKP Padang dalam memberikan pelayan kepada pengguna jasa/masyarakat senantiasa mengacu kepada Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Faktor penyebab kurangnya capaian kinerja untuk IK Persentase hasil

kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Padang adalah karena Surat tugas dari pusat seringkali terlambat setelah rekomendasi dari dinas, sehingga berimplikasi ke janji layanan. Pelaku usaha tidak melakukan tindak lanjut perbaikan sehingga Dinas tidak merekomendasikan penerbitan SKP.

3.1.5. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Stasiun PPMHKP Padang terdapat dua program yang merupakan cascading dari Unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan. Program tersebut yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen. Pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri terdapat dua kegiatan yaitu Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan serta Kegiatan Manajemen Mutu. Sementara pada Program Dukungan Manajemen terdapat satu kegiatan yaitu Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Hasil Kelautan dan Perikanan.

Sampai dengan Triwulan II ini berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja IK yang ada pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri maupun Program Dukungan Manajemen dapat mencapai target bahkan beberapa IK capaiannya melebihi target (capaian IK >100%). Keberhasilan capaian kinerja IK pada Program Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri tidak terlepas dari Capaian kinerja IK pada Program Dukungan Manajemen, begitu juga sebaliknya.

Capaian IK pada Program Program Dukungan Manajemen yang capainnya melebihi 100% yaitu IK8 : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun PPMHKP Padang, karena ditunjang oleh Program Dukungan Manajemen berupa pengelolaan dan penyediaan ASN yang professional, penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan

anggaran yang baik. Begitu juga sebaliknya capaian IK pada Program Dukungan Manajemen sebagaimana terlihat pada IK 12: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Stasiun PPMHKP Padang capaian 118, karena kegiatan pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dilaksanakan dengan baik sesuai rencana aksi.

3.2. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan kegiatan di Stasiun PPMHKP Padang Triwulan II Tahun 2026 tidak terlepas dari anggaran sebagai penggerak yang mendukung terselenggaranya kegiatan untuk melaksanakan kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja Stasiun PPMHKP Padang. Secara keseluruhan pada tahun 2026 Stasiun PPMHKP Padang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.307.638.000, berdasarkan DIPA Nomor: SP DIPA-032.13.2.567432/2026 tanggal 1 Desember 2025, namun pagu tersebut masih memungkinkan mengalami perubahan dikarenakan adanya perubahan kebijakan.

Stasiun PPMHKP Padang telah melaksanakan kegiatan pada Triwulan II Tahun 2026 sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Stasiun PPMHKP Padang sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2026

No	Sasaran Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Ralisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
SK1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	87.057.000	630.000	0,72
SK2	Terselenggaranya pengendalian sistem dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	63.500.000	0	--

SK3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel lingkup Stasiun PPMHKP Padang	3.821.321.000	1.013.256.800	26,52
	TOTAL ANGGARAN	3.971.878.000	1.013.886.800	25,53

Stasiun PPMHKP Padang pada Triwulan II Tahun 2026 mampu menyerap anggaran sebesar Rp. 1.013.886.800,- atau sebesar 25,53% dari total Anggaran Tahun 2026 sebesar Rp. 3.971.878.000,-

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pengukuran capaian kinerja di Stasiun PPMHKP Padang dilakukan terhadap 3 (Tiga) Sasaran Kegiatan dan 12 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan. Secara umum, pencapaian target indikator Stasiun PPMHKP Padang telah sesuai dengan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 seluruh target telah tercapai dengan baik, bahkan ada beberapa IK capaiannya melebihi target. Namun demikian tetap diperlukan upaya dan dukungan, baik internal maupun eksternal untuk mendukung capaian kinerja tahunan.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026, untuk perbaikan direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk capaian IK Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Padang perlu rencana aksi:
 - a. Melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan Kab/Kota dan Propinsi Sumatera Barat.
 - b. Mengikuti *Refreshment* mekanisme sertifikasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan.
2. Untuk capaian IK Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Padang perlu rencana aksi :
 - a. Melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan Kab/Kota dan Propinsi Sumatera Barat dan penyuluh.

- b. Mengikuti *Refreshment* terhadap petugas pelayanan dalam penggunaan aplikasi SiapMutu
3. Untuk Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun PPMHKP Padang diperlukan peningkatan pemahaman Operator SIDAK melalui diskusi/pelatihan/sharing session.
4. Untuk Capaian Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun PPMHKP Padang perlu mengingatkan Pemahaman Operator SIRUP melalui diskusi/pelatihan/sharing session.
5. Untuk Capaian Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun PPMHKP Padang perlu meningkatkan pemahaman petugas pelayanan untuk selalu pengguna jasa mengisi kusioner yang telah ditentukan.



**STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG**

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN PADANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ira Susanti**
Jabatan : Plt. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan

Pihak Pertama

Plt. Kepala Stasiun Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Padang



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ira Susanti

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN PADANG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	72
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	71
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	71
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Padang	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Indeks)	82,5
		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	77
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	86,2
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Persen)	86
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	92,1
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	71,75
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	77
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Indeks)	3.5

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	180.875.000
2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	63.500.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan	4.063.263.000
Total Anggaran Stasiun PPMHKP Padang Tahun 2026		4.307.638.000

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Plt. Kepala Stasiun Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Padang



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ira Susanti

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA STASIUN PPMHKP PADANG TAHUN 2026

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN/ PAGU (Rp)	SATUAN OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET OUPUT BULANAN											
							JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
SK 1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang	15.760.000	Persen	72	-	-	72	-	-	72	-	-	72	-	-	72
			a) Sertifikasi CBIB															
			b) Sertifikasi CPIB															
			c) Sertifikasi CPIB Kapal															
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang	13.800.000	Persen	72	-	-	72	-	-	72	-	-	72	-	-	72
			a) Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI)															
			b) Sertifikat Kelayakan Pengolahan															
			c) Sertifikasi HACCP															
		3	Nilai pengawasan mutu hasil perikanan di Wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Padang	4.500.000	Nilai	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
			a) Pengawasan mutu hasil perikanan domestik															
SK 2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai	4	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Padang	20.500.000	Persen	72	-	-	-	-	-	72	-	-	72	-	-	72
			a) Penguatan sistem manajemen mutu laboratorium penguji															
			b) Penguatan sistem manajemen mutu speksilembaga inspeksi															
SK 3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel lingkup Stasiun PPMHKP Padang	5	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang	28.600.000	Indeks	82,5	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	82,5
			a) Monitoring data kehadiran dan SKP															
			b) Penataan kepegawaian															
		6	Nilai pembangunan integritas lingkup Stasiun KIPM Padang	15.000.000	Nilai	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
			a) Maintenance Zona Integritas (ZI)															
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun KIPM Padang	24.241.000	Nilai	86,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,2
			a) Layanan organisasi dan tatakelola internal															
			b)															
		8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Padang	8.000.000	Persen	86	-	-	86	-	-	86	-	-	86	-	-	86
			a) Layanan penyelenggaraan kearsipan															
			b)															
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Padang	24.296.000	Nilai	92,1	-	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-	92,1
			a) Layanan manajemen keuangan															
			b)															
		10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun KIPM Padang	27.682.000	Nilai	71,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,75
			a) Layanan Perencanaan dan Penganggaran															
			b)															
		11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun KIPM Padang	27.768.000	Persen	77	-	-	77	-	-	77	-	-	77	-	-	77
			a) Penyusunan RK BMN															
			b) Pengelolaan keuangan, BMN, PNBP dan Barang/jasa															
		12	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Padang	12.400.000	Nilai	89	-	-	89	-	-	89	-	-	89	-	-	89
			a) Peningkatan kemudahan sistem pelayanan publik															

Padang Pariaman, 17 Juni 2026
Kepala Stasiun PPMHKP Padang



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dudung Daenuri



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN PADANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dudung Daenuri**
Jabatan : Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Juni 2026

PIHAK KEDUA

Plt. Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

PIHAK PERTAMA

Kepala Stasiun Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Padang



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dudung Daenuri

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	72
		3	Nilai pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	71
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	72
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun Pengendalian Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan Padang	5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Indeks)	82,5
		6	Nilai Pembangunan Zona Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	77
		7	Nilai penilaian mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	86,2
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Persen)	86
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	92,1
		10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	71,75
		11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Padang (%)	77
		12	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Padang (Nilai)	89

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang	3.821.321.000
2.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	87.057.000
3	Manajemen Mutu	63.500.000
Total Anggaran Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang Tahun 2026		3.971.878.000

Jakarta, 17 Juni 2026

Pihak Kedua
Plt. Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan Padang



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dudung Daenuri



STASIUN PPMHKP PADANG